

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH,  
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN BELANJA MODAL  
TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH**

(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2017-  
2021)

**PROPOSAL PENELITIAN**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Ekonomi pada Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Padang



Oleh:

**ADITIA WARMAN**  
**18043068/2018**

JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2023

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH UKURAN PEMERINTAH, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN BELANJA  
MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

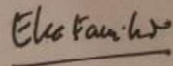
Nama : Aditia Warman  
TM/ NIM : 2018/18043068  
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)  
Departemen : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, April 2024

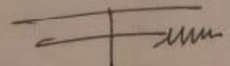
Disetujui oleh :

Ketua Departemen Akuntansi

Pembimbing



Dr. Eka Fauzihardani, S.E., M.Si, Ak  
NIP. 19710522 200003 2 001



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc.Ak  
NIP. 19730213 199903 1 003

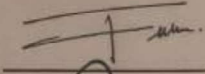
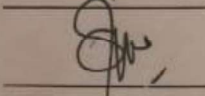
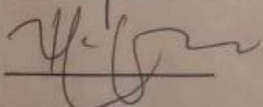
HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Negeri Padang*

PENGARUH UKURAN PEMERINTAH, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN BELANJA  
MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Nama : Aditia Warman  
TM/NIM : 2018/18043068  
Departemen : Akuntansi  
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, April 2024

No	Jabatan	Tim Penguji Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Fefri Indra Arza, SE, M.Sc.Ak	
2.	Anggota	Dewi Pebriyani, SE, M.Si	
3.	Anggota	Halkadri Fitra, SE, MM	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aditia Warman  
NIM/Tahun Masuk : 18043068/2018  
Tempat/Tgl. Lahir : Pasaman/18 juni 2000  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jln. Anggur no. 32 A, Jati Baru, Kota Padang  
No. Hp/Telp : 081363651561  
Judul Skripsi : Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten /Kota di Sumatera Barat Tahun 2017-2021)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/ skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/ skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/ skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/ skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji, dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh- sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/ skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Oktober 2023

Aditia Warman  
Nim:18043068/2018

## ABSTRAK

**Aditia Warman (18043068) : Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (*Studi Empiris Pada Kabupaten /Kota di Sumatera Barat Tahun 2017-2021*).**

**Dosen Pembimbing : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode Total Sampling dengan jumlah sampel 19 Kabupaten/ Kota dengan jangka waktu 5 tahun. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran Pemerintah berpengaruh negative dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Belanja Modal berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

**Kata Kunci: Kemandirian Keuangan Daerah, Ukuran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan teladan terbaik bagi manusia menuju kebaikan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Selain itu juga untuk memperluas ilmu pengetahuan untuk menjadikan penulis sebagai orang yang berguna bagi masyarakat. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak dapat mendapat bantuan dan dorongan serta kemudahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc.Ak selaku dosen pembimbing atas semua bimbingan, motivasi serta kesediaan waktu memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dewi Pebriyani, S.E, M.Si selaku dosen penguji 1 untuk penilaian dan saran perbaikan terhadap skripsi ini. Bapak Halkadri Fitra, S.E, MM selaku dosen penguji 2 untuk penilaian dan saran perbaikan terhadap skripsi ini.
3. Ibu Dr. Eka Fauzihardani, S.E., M.Si,Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang untuk semua kebijakan yang sudah ditetapkan.
4. Ibu Mia Angelina Setiawan, S.E, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang sudah memberikan masukan dan arahan selama penulis melaksanakan studi.
5. Abang Rizky selaku admin prodi akuntansi yang sudah mempermudah segala urusan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kakak senior Bang Abram, Bang Rizky dan Bang Rafi yang dengan senang hati sudah membagi ilmunya untuk memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.

7. Teristimewa untuk Mama dan Abang yang sangat penulis sayangi, atas doa-doa luar biasa yang tidak hentinya serta kasih sayang yang tidak ternilai sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk selalu percaya pada setiap langkah yang penulis pilih dan memberikan keyakinan bahwa penulis mampu memberikan yang terbaik. Semoga lelah Mama dan Abang dapat berbuah manis suatu hari nanti.
8. Dean terimakasih sudah menjadi mentor seperjuangan dalam proses penyusunan skripsi penulis.
9. Rezza dan Ikrall selaku Mandan Terbaik yang selalu ada disetiap penulis butuh. Teman-teman akuntansi kelas B, penulis beruntung sekali bisa berada diantara orang-orang luar biasa seperti kalian.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan Saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi penulis.

Padang, Oktober 2023

**Aditia Warman**

NIM. 18043068

## DAFTAR ISI

PROPOSAL PENELITIAN.....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
ABSTRAK.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Kajian Teoritis.....	11
B. Ukuran Pemerintah.....	12
C. Pertumbuhan Ekonomi.....	13
a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi.....	13
b. Ukuran Pertumbuhan Ekonomi.....	14
c. Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	15
d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi.....	16
D. Belanja Modal.....	17
a. Pengertian Belanja Modal.....	17
b. Klasifikasi Belanja Modal.....	19
E. Kemandirian Keuangan Daerah.....	20
F. Penelitian Yang Relevan.....	22
G. Pengembangan Hipotesis.....	25
H. Kerangka Konseptual.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	30



C. Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	30
D. Metode Pengumpulan Data .....	31
E. Variabel dan Definisi Operasional Variabel .....	31
F. Model dan Analisis Data .....	34
BAB IV _HASIL DAN PEMBAHASAN .....	42
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	42
DAFTAR PUSTAKA .....	67

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah.....	2
Tabel 1. 2 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat .....	5
Tabel 2. 1 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	22
Tabel 4. 1 Nama Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.....	43
Tabel 4. 2 Pengukuran Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021 .....	45
Tabel 4. 3 Perhitungan Ukuran Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021 .....	47
Tabel 4. 4 Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi di Kab/Kota Sumatera Barat Tahun 2017-2021 .....	48
Tabel 4. 5 Perhitungan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021 .....	50
Tabel 4. 6 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	51
Tabel 4. 7 Hasil Uji Chow.....	53
Tabel 4. 8 Hasil Uji Hausman .....	54
Tabel 4. 9 Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM) .....	54
Tabel 4. 10 Adjusted R-Squared .....	56
Tabel 4. 11 Uji Multikolinearitas .....	57
Tabel 4. 12 Uji Heterokedastisitas .....	57
Tabel 4. 13 Hasil Uji t-Statistik.....	59
Tabel 4. 14 Hasil Uji F-Statistik .....	60

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1. Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kota di Sumatera Barat.</b>	<b>5</b>
<b>Gambar 2. Kerangka Pemikiran .....</b>	<b>29</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara universal, tujuan utama otonomi daerah merupakan pemberdayaan wilayah buat mengelola keuangannya secara mandiri, sehingga pengelolaan keuangan bisa memenuhi kebutuhan tiap-tiap wilayah, serta pengelolaan keuangan bisa lebih efisien serta efektif (desentralisasi fiskal). Daerah bisa memetakan kebutuhan mereka sendiri serta mengalokasikan sumber energi yang cocok. Sentralisasi fiskal, di mana pemerintah pusat mengawasi keuangan daerah, tidak berlaku di sini.

Menurut Abdul Halim (2011), kemandirian keuangan suatu daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap kapasitasnya untuk menjalankan otonomi. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk administrasi daerah, pemeliharaan, dan penyediaan layanan kepada penduduknya yang telah membayar pajak dan pungutan lainnya.

Kemandirian keuangan daerah dapat diukur melalui Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) dengan perbandingan total pendapatan asli daerah dengan total dana transfer. Nilai IKF berkisar antara 0 (semua belanja ditanggung dana transfer dan tidak terdapat kontribusi PAD)

hingga 100 (semua belanja ditanggung PAD dan tidak terdapat dana transfer). Dengan demikian, semakin rendah nilai IKF, maka semakin Belum Mandiri daerah tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi nilai IKF, maka semakin tinggi kemandirian fiskal suatu daerah (BPK-RI, 2020). Kemandirian fiskal daerah dapat dikelompokkan menjadi “Belum Mandiri”, “Menuju Kemandirian”, ”Mandiri” dan “Sangat Mandiri seperti ditunjukkan pada table berikut:

**Tabel 1. 1 Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah**

No	Nilai IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
1	$0 \leq \text{IKF} < 25$	Belum Mandiri
2	$25 \leq \text{IKF} < 50$	Menuju kemandirian
3	$50 \leq \text{IKF} < 75$	Mandiri
4	$75 \leq \text{IKF} \leq 100$	Sangat mandiri

*Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*

Keuangan daerah sebelum otonomi diberlakukan dan setelah keuangan daerah periode otonomi di Indonesia menunjukkan perubahan. Karena daerah memiliki kebebasan untuk mengalokasikan sumber daya keuangannya, kemandirian keuangan daerah merupakan konsekuensi dari diberlakukannya otonomi daerah. Namun dalam praktiknya, pendanaan kegiatan otonomi daerah bersumber dari uang transfer pusat yang mengalir dan tumbuh sangat cepat dari tahun ke tahun, sehingga pelaksanaan kebijakan

desentralisasi fiskal yang dilakukan sejak tahun 2004, dan kebijakan otonomi daerah yang dilakukan sejak tahun 2001, belum juga membuahkkan kemandirian keuangan daerah. Hal ini tercermin dari rendahnya tingkat desentralisasi fiskal di pemerintah kabupaten/kota di Indonesia (Pusat Kajian Anggaran DPR RI, 2021).

Perihal ini sangat gampang sekali buat dibuktikan, sebab tercatat sepanjang 2 dekade terakhir jumlah dana transfer buat wilayah senantiasa saja bertambah signifikan dari Rp81, 05 triliun (2001) jadi Rp812, 97 triliun (2019) serta sedikit menyusut di tahun (2020) jadi Rp762,54 triliun selaku akibat pandemic covid-19. Dana transfer dari APBN setelah itu jadi sumber utama pemasukan Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah (APBD) yang sepanjang 2 dekade jatah rata-rata sebesar 66,81% dari total pemasukan daerah. Total Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2001 hingga tahun 2020 cuma menyumbangkan proporsi 23,67% daripemasukan daerah (Departemen Keuangan RI, 2021). Maksudnya, dari aspek Kemandirian fiskal pemerintah daerah di Indonesia masih terkategori sangat rendah (Belum Mandiri).

Selanjutnya, menurut temuan penilaian desentralisasi fiskal tahun 2004 hingga 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebanyak 443 dari 503 pemerintah daerah masih dikategorikan belum mandiri. Hal itu menunjukkan bahwa hingga 88,07% pemerintah daerah masih belum berpemerintahan sendiri. Dari tahun 2013 hingga 2020, setidaknya 468 pemerintah daerah, atau 93,4% dari seluruh pemerintah

daerah di Indonesia, tetap menggunakan pengelolaan keuangan yang sama, menurut Badan Pemeriksa Keuangan (Pusat Pengkajian Anggaran DPR RI, 2021). Berikut tabel rasio tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat 2017-2021.

**Tabel 1. 2 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata	Tingkat Kemandirian
Kabupaten Lima Puluh Kota	11%	6%	7%	7%	7%	7,6%	Belum Mandiri
Kabupaten Agam	13%	8%	9%	5%	11%	9,2%	Belum Mandiri
Kabupaten kepulauan Mentawai	8%	5%	5%	5%	4%	5,4%	Belum Mandiri
Kabupaten Padang Pariaman	12%	7%	8%	10%	10%	9,4%	Belum Mandiri
Kabupaten Pasaman	17%	12%	11%	11%	10%	12,2%	Belum Mandiri
Kabupaten Pesisir Selatan	13%	9%	9%	10%	11%	10,4%	Belum Mandiri
Kabupaten Sijunjung	13%	10%	10%	11%	11%	11%	Belum Mandiri
Kabupaten Solok	11%	7%	7%	7%	7%	7,8%	Belum Mandiri
Kabupaten Tanah Datar	17%	11%	12%	12%	12%	12,8%	Belum Mandiri
Kota Bukittinggi	19%	18%	18%	14%	16%	17%	Belum Mandiri
Kota Padang Panjang	18%	18%	16%	18%	21%	18,2%	Belum Mandiri
Kota Padang	36%	31%	32%	32%	34%	33%	Menuju Kemandirian
Kota Payakumbuh	19%	16%	15%	20%	17%	17,4%	Belum Mandiri
Kota Sawahlunto	12%	9%	10%	13%	10%	10,8%	Belum Mandiri
Kota Solok	8%	8%	8%	9%	9%	8,4%	Belum Mandiri
Kota Pariaman	6%	6%	7%	6%	8%	6,6%	Belum Mandiri
Kabupaten Pasaman Barat	17%	16%	10%	12%	14%	13,8%	Belum Mandiri
Kabupaten Dharmasraya	12%	10%	9%	10%	10%	10,2%	Belum Mandiri
Kabupaten Solok Selatan	11%	9%	9%	11%	12%	10,4%	Belum Mandiri

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Sumbar (data diolah)

**Gambar 1. Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kota di Sumatera Barat**



Sumber: data diolah



Berdasarkan gambar 1.1 diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2017-2021 belum ada yang mandiri. Meskipun Padang merupakan salah satu dari 19 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat yang berada di jalur yang tepat menuju kemandirian keuangan daerah dengan rata-rata nilai Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) sebesar 33%, namun hal itu belum bisa mengantarkan Provinsi Sumatera Barat dalam status Provinsi yang mandiri secara keuangan. Proporsi nilai IKF Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat semuanya masuk dalam status belum mandiri dengan rata-rata nilai IKF sebesar 12,31%. Hal ini menunjukkan betapa besar ketergantungannya Kabupaten/Kota di Sumatera Barat terhadap dukungan pemerintah pusat.

Variabel lingkungan, masalah kesejahteraan, dan pertimbangan keuangan adalah tiga kategori menurut Groves, SM, W.M. Godsey, dan M.A. Shulman (2001) yang menentukan kemandirian keuangan daerah di era otonomi daerah. Menurut berbagai penelitian yang menganalisis hubungan antara karakteristik tersebut, terdapat sejumlah faktor yang berdampak pada berfungsinya pemerintah daerah yang mandiri secara finansial baik secara domestik maupun global. Ukuran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal adalah beberapa variabel yang berdampak pada kemandirian keuangan daerah.

Kemandirian keuangan daerah dipengaruhi secara positif oleh

ukuran pemerintah daerah (Kuncahyono, H. 2015). Pemerintah daerah dengan total asset yang besar dapat secara efektif mengelola jalannya pemerintahan dan menggunakan nilai aset yang tinggi untuk meningkatkan aliran pendapatan daerah yang prospektif.

Penelitian Leny Gaghana dkk. (2018) pada kabupaten dan kota di Sulawesi Utara menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Besar kecilnya kemandirian finansial suatu daerah akan bergantung pada laju pertumbuhan ekonominya. Tingkat kemandirian finansial suatu wilayah tumbuh dengan kecepatan yang sama dengan pertumbuhan ekonominya.

Penelitian Sarah Normalita tahun 2017 tentang “Analisis Belanja Modal dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah” menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini didukung oleh penelitian (Defitri, 2020) yang menghasilkan hasil serupa. Pengeluaran pembangunan infrastruktur daerah (Belanja Modal) akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan penurunan ketergantungan daerah pada pembayaran transfer (kemandirian keuangan daerah).

Provinsi Sumatera Barat memiliki kemandirian finansial yang sangat kecil di tingkat daerah. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata nilai Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat hanya sebesar 12,31%, artinya ketergantungan substansial pada uang

transfer pusat masih sangat besar. Akibatnya, ini menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti.

Para peneliti tertarik pada masalah ini karena beberapa penyelidikan sebelumnya juga mengungkap perbedaan dalam temuan penelitian. Analisis data panel digunakan untuk menyelidiki kabupaten dan kota di Sumatera Barat sebagai objek penelitian selama periode lima tahun, dari tahun 2017 hingga 2021. Pemilihan kabupaten dan kota di Sumatera Barat sebagai lokasi penelitian membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya. Selain itu, penambahan dua variabel independen ukuran pemerintah dan tingkat pertumbuhan ekonomi, serta tahun baru untuk penelitian juga membedakan penelitian ini. Mencermati latar belakang dan informasi di atas mengenai isu kemandirian keuangan daerah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2017-2021)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disimpulkan dari konteks permasalahan yang diangkat di atas sebagai berikut:

1. Apa pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah?
2. Apa pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemandirian

Keuangan Daerah?

3. Apa pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Menganalisis isu-isu tersebut akan mengungkapkan tujuan penelitian:

1. Untuk memastikan bagaimana kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh ukuran pemerintah.
2. Untuk mengetahui bagaimana kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh kemajuan ekonomi.
3. Untuk mengkaji bagaimana belanja modal mempengaruhi kemandirian keuangan daerah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, berikut manfaat dari penelitian ini:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan dengan Jurusan Akuntansi.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan masukan kepada Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat agar memaksimalkan koordinasi antar kabupaten kota di Sumatera Barat untuk meningkatkan kemandirian daerah.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat Sumatera Barat bahwa pentingnya taat dalam membayar pajak dan retribusi

dalam menjalankan usaha guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga berdampak pada kemandirian daerah.

- c. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan penelitian oleh pihak lain yang berminat untuk melakukan penelitian dengan subjek yang sama.